

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN TINGKAT
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN WULUHAN**

Risa Leni Puspitasari¹, Diana Dwi Astuti², Wiwik Fitria Ningsih³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember
email: penulis risaleni27@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember
email: penulis diana@stie-mandala.ac.id

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember
email: penulis wiwik@itsm.ac.id

Dikirim: 30 Juli 2023

Direvisi: 17 Agustus 2023

Diterima: 31 Agustus 2023

Penulis Korespondensi

Nama: Risa Leni Puspitasari

E-mail: risaleni27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana APBDes dengan variabel moderasi tingkat pendidikan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dengan teknik pengamilan sampel *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes. Variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes. Tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana APBDes.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa, Pengelolaan APBDes

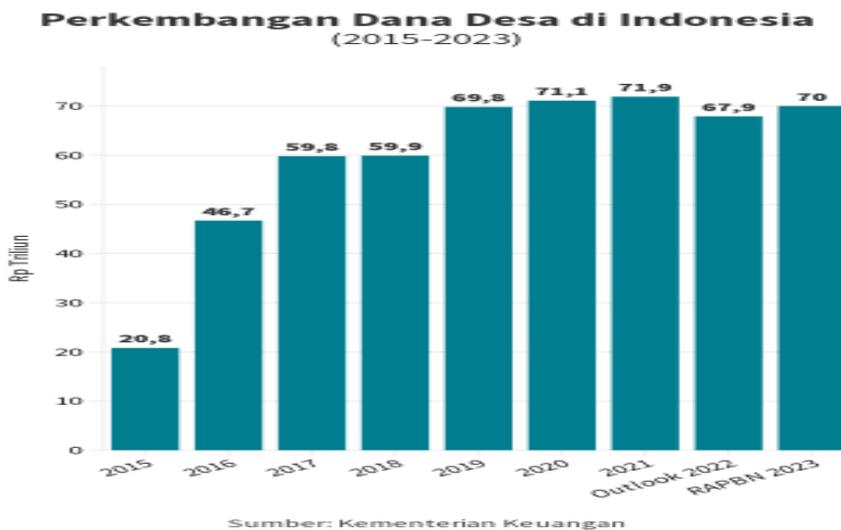
ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency, accountability, community participation, and the effectiveness of the village government on the management of APBDes funds with the moderating variable of education level in Tanjungrejo Village, Wuluhan District. This study used a method of distributing questionnaires with a purposive sampling technique. The analysis used is multiple linear regression and moderation regression analysis. The population of this study is the community in Tanjungrejo Village, Wuluhan District. The results of this study indicate that partially transparency, community participation, and village government effectiveness have no effect on the management of APBDes funds. The accountability variable partially influences the management of APBDes funds. The level of education cannot moderate the relationship between transparency, accountability, community participation, and the effectiveness of the village government in managing APBDes funds.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Government Efficiency, APBDes Management*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU RI Nomor 6 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 Tentang Desa). Bambang Brodjonegoro (2015:1), Dana desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, serta meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Dana desa diberikan dalam bentuk hibah dan dialokasikan melalui APBN setiap tahunnya. Dana desa dikelola oleh pemerintah desa dengan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Dana desa harus digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).



Gambar 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2023 (dalam triliun rupiah)

Sumber : <https://dataindonesia.id>

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran dana desa mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan terus menerus, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4 triliun dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah dana desa yang telah dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut kemudian akan dibagi rata pada setiap desa, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar per tahun. Pada tahun 2023 ini dana desa lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian tersebut juga ditujukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari *stunting*, pengembangan ekonomi desa, pelaksanaan padat karya tunai, hingga penanganan bencana.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: a) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing (Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 4-5). Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 29-30). Agar supaya pemerintah desa memiliki tata kelola yang baik maka perlu diterapkan prinsip *good governance*. Francis Fukuyama (2013) menyatakan bahwa *good governance* melibatkan tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang kuat. Transparansi artinya pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya dengan menyediakan informasi yang menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan juga memadai. Sedangkan akuntabilitas adalah entuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kebijakan, langkah-langkah, maupun kinerja yang dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dibutuhkan efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa agar berjalan secara optimal, efisien, dan memuaskan bagi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis secara parsial pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan

APBDes di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. (2) Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan APBDes jika dimoderasi dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai, dengan kata lain transparansi menjadi bentuk komunikasi unggul kepada masyarakat dan lingkungan eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Lutfi Iznillah, Amir Hasan, dan Yesi Mutia (2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H1 : Diduga transparansi berpengaruh dalam pengelolaan APBDes

Dalam hal organisasi pemerintahan akuntabilitas publik digunakan sebagai pemberi informasi dan penjelasan yang cukup dapat mewakili keadaan yang sebenarnya dalam suatu organisasi atas kegiatan dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

H2 : Diduga akuntabilitas berpengaruh dalam pengelolaan APBDes

Partisipasi masyarakat sangat penting sekali terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa memberikan informasi keadaan dan kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ray Septianis Kartika (2012) menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.

H3 : Diduga secara parsial Partisipasi Masyarakat berpengaruh dalam pengelolaan APBDes

Dalam pengelolaan APBDes, efektivitas pemerintah desa diperlukan agar pengelolaan dilakukan secara efektif dan pelaksanaan program yang sudah ditentukan dapat dilakukan dengan lancar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Partina, dan Henin Indriyani (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah melaksanakan Transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2019. Secara umum transparansi, akuntabilitas dan efektivitas di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupten banyuasin sudah berjalan dengan baik.

H4 : Diduga secara parsial Efektivitas Pemerintah desa berpengaruh dalam pengelolaan APBDes

Tingkat pendidikan dapat memengaruhi transparansi pengelolaan APBDes melalui beberapa cara. Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat desa dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan APBDes. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk memahami informasi keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

Sebagai variabel moderasi, tingkat pendidikan dapat memoderasi hubungan antara transparansi pengelolaan APBDes dengan faktor-faktor lain. Misalnya, jika terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan APBDes, tingkat pendidikan dapat memperkuat hubungan ini dengan memungkinkan masyarakat yang lebih terdidik untuk lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan APBDes.

H5 : Diduga tingkat pendidikan dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Tingkat pendidikan dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan APBDes karena masyarakat desa yang lebih terdidik akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai prinsip akuntansi dan keuangan, serta dapat memahami informasi keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes dengan lebih baik. Sebagai variabel moderasi, tingkat pendidikan dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan faktor-faktor lain. Misalnya, jika terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan APBDes, tingkat pendidikan dapat memperkuat hubungan ini dengan memungkinkan masyarakat yang lebih terdidik untuk lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan APBDes.

Pancawati Hardiningsih, dkk (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya aparatur, komitmen organisasi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh sumber daya aparatur akuntabilitas alokasi dana desa.

H6 : Diduga tingkat pendidikan dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes melalui beberapa mekanisme. Pertama, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan APBDes. Kedua, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih percaya diri dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih sadar akan hak-hak mereka dalam partisipasi dalam pengelolaan APBDes.

H7 : Diduga tingkat pendidikan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan APBDes dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan masyarakat dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan dapat memoderasi hubungan antara pemerintah desa dan efektivitas pengelolaan APBDes. Misalnya, di desa yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, pemerintah desa yang berkualitas dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dalam mengelola APBDes. Namun, di desa yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pemerintah desa yang berkualitas mungkin tidak dapat memperoleh dukungan yang cukup dalam pengelolaan APBDes.

H8 : Diduga tingkat pendidikan dapat memperkuat efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes

METODE PENELITIAN

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluh, Kabupaten Jember. Desa Tanjungrejo memiliki luas wilayah 1.083,175 Ha, yang terdiri dari 4 dusun yaitu, Dusun Krajan Kulon, Dusun Krajan Wetan, Dusun Karangsono, dan Dusun Grobyok. Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluh berbatasan dengan dengan beberapa wilayah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Glundengan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kesilir, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ampel, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sabrang. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluh. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat sebab dan akibat, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis datanya bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ada (Sugiyono, 2013:8). Variabel dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintah desa sebagai variabel independen, pengelolaan dana APBDes sebagai variabel dependen, dan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21246670
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.053
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 ^c

Dari hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,079 > 0,005$.

2. Uji Multikolinieritas

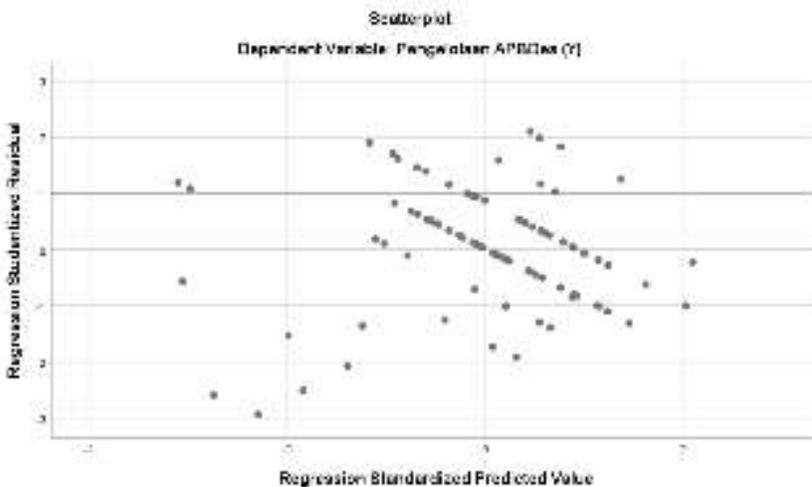
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		

Transparansi (X1)	.976	1.024
Akuntabilitas (X2)	.791	1.265
Partisipasi Masyarakat (X3)	.793	1.262
Efektivitas Pemerintah Desa (X4)	.989	1.011

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance value dari ke empat variabel memiliki nilai >0.1 dan nilai VIF <10 maka ke empat variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar dengan uji scatterplot terlihat bahwa grafik scatterplot, titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7.253	1.668		4.348	.000
	Transparansi (X1)	.102	.057	.138	1.784	.078
	Akuntabilitas (X2)	.318	.057	.481	5.608	.000
	Partisipasi Masyarakat (X3)	.198	.074	.229	2.669	.009

Efektivitas Pemerintah Desa (X4)	.132	.058	.173	2.258	.026
-------------------------------------	------	------	------	-------	------

Berdasarkan hasil output di atas dapat diperoleh hasil persamaan analisis regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 7.253 + 0.102X_1 + 0.318X_2 + 0.198X_3 + 0.132X_4$$

Dengan konstanta sebesar 7.253, koefisien Transparansi sebesar 0.102, koefisien Akuntabilitas sebesar 0.318, koefisien Partisipasi Masyarakat 0.198, dan koefisien Efektivitas Pemerintah Desa sebesar 0.132 dengan standar error 0.05.

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Konstanta (a) memiliki nilai koefisien positif artinya Pengelolaan APBDes di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun dalam pelaksanaan pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal.
2. Variabel Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan APBDes (Y) koefisien regresinya sebesar 0.102 artinya hubungan antara Transparansi dengan Pengelolaan APBDes searah positif, jika Transparansi pemerintah desa transparan terhadap informasi yang berkaitan dengan APBDes dan masyarakat menerima informasi tersebut maka Pengelolaan APBDes akan berjalan dengan baik karena masyarakat memberikan informasi terkait dengan kebutuhan mereka.
3. Variabel Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan APBDes (Y) koefisien regresinya sebesar 0.318 artinya hubungan antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan APBDes searah positif, jika pengelolaan APBDes dilakukan secara akuntabel maka program-program yang sudah direncanakan oleh desa akan berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) terhadap Pengelolaan APBDes koefisien regresinya sebesar 0.198 artinya hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan APBDes searah positif, jika masyarakat berpartisipasi menyuarkan aspirasi dan pendapatnya dalam kegiatan desa terutama saat Musrenbang maka pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan dengan baik.
5. Variabel Efektivitas Pemerintah Desa (X4) terhadap Pengelolaan APBDes (Y) nilai koefisien regresinya sebesar 0.132 artinya hubungan antara Efektivitas Pemerintah Desa dengan Pengelolaan APBDes searah positif, jika Efektivitas Pemerintah Desa berjalan dengan baik maka program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

5. Analisis Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	-13.901	12.222		-1.137	.258
	Transparansi (X1)	.144	.423	.196	.341	.734
	Akuntabilitas (X2)	.922	.423	1.398	2.180	.032
	Partisipasi Masyarakat (X3)	.615	.595	.712	1.035	.304
	Efektivitas Pemerintah Desa (X4)	.239	.440	.314	.542	.589
	Tingkat Pendidikan (Z)	1.392	.778	1.775	1.789	.077
	Transparansi*Tingkat Pendidikan	-.003	.027	-.095	-.112	.911
	Akuntabilitas*Tingkat Pendidikan	-.040	.027	-1.367	-1.445	.152
	Partisipasi Masyarakat*Tingkat Pendidikan	-.027	.038	-.779	-.712	.478
	Efektivitas Pemerintah Desa*Tingkat Pendidikan	-.007	.027	-.237	-.270	.788

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = -13.901 + 0.144 X1 + 0.922 X2 + 0.615 X3 + 0.239 X4 + 1392 5Z -0.003 X1*Z -0.40 X2*Z -0.27 X3*Z -0.007 X4*Z$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui :

1. Persamaan nilai konstanta sebesar -13901 hal ini membuktikan bahwa apabila variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa, dan Tingkat Pendidikan berada pada nilai konstan akan mempengaruhi Pengelolaan APBDes sebesar -13901.
2. Uji tanpa interaksi Pengetahuan Investasi dan Teknologi Informasi yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi 0.76 lebih besar dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Pengetahuan Investasi dengan Teknologi Informasi (X1*Z) menunjukkan tingkat signifikansi 0,911 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga Diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan merupakan homologiser moderasi artinya variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

3. Uji tanpa interaksi Akuntabilitas dan Tingkat Pendidikan yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi 0.64 lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Akuntabilitas dengan Tingkat Pendidikan (X_2*Z) menunjukkan tingkat signifikansi 0,152 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga Diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan merupakan homologiser moderasi artinya variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.
4. Uji tanpa interaksi Partisipasi Masyarakat dan Tingkat Pendidikan yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi 0.141 lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Partisipasi Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan (X_3*Z) menunjukkan tingkat signifikansi 0,478 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga Diperoleh b2 signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan merupakan homologiser moderasi artinya variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.
5. Uji tanpa interaksi Efektivitas Pemerintah Desa dan Tingkat Pendidikan yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi 0.205 lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Efektivitas Pemerintah Desa dengan Tingkat Pendidikan (X_4*Z) menunjukkan tingkat signifikansi 0,788 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga Diperoleh b2 signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan merupakan homologiser moderasi artinya variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

6. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t (Parsial)

		Coefficients^a	
Model		T	Sig.
1	(Constant)	4.348	.000
	Transparansi (X1)	1.784	.078
	Akuntabilitas (X2)	5.608	.000

Partisipasi Masyarakat (X3)	2.669	.009
Efektivitas Pemerintah Desa (X4)	2.258	.026

Berdasarkan tabel di atas hasil Uji t regresi berganda, dapat diketahui bahwa:

- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients diketahui nilai signifikansi variabel Transparansi sebesar 0,078 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Transparansi terhadap Pengelolaan APBDes, sehingga H1 ditolak.
- Variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes, artinya H2 diterima.
- Pada variabel Partisipasi Masyarakat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,09 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes, sehingga H3 ditolak.
- H3 ditolak.
- Pada variabel Efektivitas Pemerintah Desa diketahui nilai signifikansi sebesar 0,26 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes, sehingga H4 ditolak.

2. Hasil Uji t Moderasi

Model	Coefficients ^a	
	T	Sig.
Transparansi*Tingkat Pendidikan	-.112	.911
Akuntabilitas*Tingkat Pendidikan	-1.445	.152
Partisipasi Masyarakat*Tingkat Pendidikan	-.712	.478
Efektivitas Pemerintah Desa*Tingkat Pendidikan	-.270	.788

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil Uji t regresi moderasi, dapat diketahui sebagai berikut:

- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Transparansi dengan Tingkat Pendidikan

sebesar 0,911 yang berarti nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan APBDes, artinya H5 ditolak.

- b. Interaksi variabel Akuntabilitas dengan Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yakni 0,152. Sehingga variabel Teknologi Informasi tidak dapat memoderasi hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan APBDes dan H6 ditolak.
- c. Nilai signifikansi interaksi variabel Partisipasi Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai sebesar 0,478. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel Teingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes, sehingga H7 ditolak.
- d. Diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Efektivitas Pemerintah Desa dengan Tingkat Pendidikan sebesar 0,788 yang berarti nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Efektivitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan APBDes, artinya H8 ditolak

KESIMPULAN

1. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan APBDes.
2. Terdapat pengaruh antara variabel Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan APBDes.
3. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Partisipasi Masyarakat (X3) terhadap Pengelolaan APBDes.
4. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Efektivitas Pemerintah Desa (X4) terhadap Pengelolaan APBDes.
5. Tingkat Pnedidikan tidak dapat memoderasi hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan APBDes. Selain itu Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini diketahui merupakan homologiser moderasi yang artinya variabel yang memiliki potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel indepdnen dan variabel dependen.
6. Tingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDes. Selain itu Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini diketahui merupakan homologiser moderasi yang artinya variabel yang memiliki potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel indepdnen dan variabel dependen.
7. Tingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes. Selain itu Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini diketahui merupakan homologiser moderasi yang artinya variabel yang memiliki potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel indepdnen dan variabel dependen.
8. Tingkat Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan Efektivitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan APBDes. Selain itu Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini diketahui merupakan homologiser moderasi yang artinya variabel yang memiliki potensial

menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

REFERENSI

- Ariawaty, R. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera.
- D. N. Aspin, J. D. Chapman, M. Hatton, dan Y. Sawano (2012). *International Handbook of Lifelong Learning*. Dordrecht: Springer.
- Erik Hanushek dan Ludger Woessmann (2012). “Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation.” *Journal of Economic Growth*, Vol. 17, No. 4.
- Firdaus, M. (2019). *Ekonometrika Satuan Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Febrianto, R., Mujiyati. (2022). “Peran Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.”
- Fukuyama, F. (2013). “What is Governance? Governance”, 26(3), 347-368

- Ghozali, imam. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program spss*. Cetakan empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sudaryono, M.Si (2018). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Yogyakarta. Gava Media.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugista, R. A. (2017). “Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan.” 1-63.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28102>
- Solimun, 2011. *Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi*. Program Studi Statistika Universitas Brawijaya.
- Undang-undang RI Nomor 6 Pasal 1 ayat 1 tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2011). *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.